



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOKHAMAD YASIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
3. NHK : **634891**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.400.000.000

1. Tanah Seluas 2.382 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 962 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1.529 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 2.170 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 S CVT A/T SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 218.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.650.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 154.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.830.650.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.830.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.